



Pengusaha Kuliner Butuh Adaptasi

■ Kebijakan Pembatasan Dianggap Mendadak

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di DIY dinilai terlalu mendadak. Jarak antara waktu penekanan Instruksi Gubernur (Ingub) dan implementasi cukup dekat, lebih kurang tiga hari. Hal ini membuat sejumlah industri harus beradaptasi dengan cepat mengikuti peraturan tersebut.

"Kami di industri kuliner, hotel, restoran, dan kafe menyayangkan karena peraturan yang dibuat dan disahkan selalu dadakan," ungkap Khairul Anwar, Konsultan Pemasaran, Restoran, dan UMKM di Yogyakarta kepada *Tribun Jogja*, Jumat (8/1).

Diketahui, usaha kuliner seperti restoran dan kafe ikut terdampak PSTKM yang rencananya bakal diberlakukan 11-25 Januari 2021. Pengunjung restoran dibatasi hanya 25 persen dari ketersediaan tempat.

"Ya, itu juga terdampak. Bayangin kalau satu restoran hanya menampung maksimal 25 pengunjung, maka

Bayangin kalau satu restoran hanya menampung maksimal 25 pengunjung, maka 25 persennya adalah 6 orang saja.

Khairul Anwar

MENDARI CARA BERTAHAN

- Kebijakan PSTKM di DIY 11-25 Januari mendatang dinilai akan memberatkan pelaku usaha.
- Restoran, kafe, hotel akan semakin kesulitan untuk bertahan di tengah krisis ini.
- Namun demikian, para pelaku usaha akan patuh dengan peraturan demi keselamatan dan kesehatan bersama.
- PHRI DIY berharap pemda bisa memberikan relaksasi bagi para anggotanya.
- Terlebih okupansi kamar hotel saat ini baru mencapai 30%.
- Baru ada 189 hotel & restoran anggota PHRI yang kini kembali beroperasi.
- GIPI DIY meminta pemda melakukan monitoring dan evaluasi penerapan PSTKM.

GRAFIS/FAUZIA RAHMATI

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,

Pengusaha Kuliner Butuh Adaptasi

• Sambungan Hal 1

25 persennya adalah 6 orang saja," tutur Khairul.

Ia menjelaskan, pihaknya memerlukan waktu untuk beradaptasi dan menjadikan semuanya lancar. Meski begitu, pelaku usaha kuliner tetap akan mengikuti aturan pemerintah. "Semua berujung pada keselamatan banyak pihak, jadi kami juga tidak akan mengedepankan ego demi kepentingan masyarakat," jelasnya.

Khairul mengungkapkan, pelaku usaha akan memaksimalkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta optimalisasi jalur pesanan *take away* (bawa pulang).

Sementara itu, Kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY merasa dikambinghitamkan dengan adanya peraturan pemerintah yang terkesan mendarak. Hal itu diungkapkan Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono saat wawancara via Zoom Meeting bersama Dinas Pariwisata DIY, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan, sampai saat ini PHRI DIY belum menerima salinan surat Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 1/INSTR/2021 serta SE Disparta DIY tentang pengetatan pembatasan tempat wisata.

Namun yang saat ini ingin ia tegaskan, sebelum adanya kebijakan PSBB Jawa-Bali dan PSTKM DIY, sudah banyak wisatawan yang membatalkan pemesanan hotel. Dari kondisi itulah, Deddy merasa pengusaha hotel merasa diobok-obok dengan banyaknya aturan yang muncul secara mendadak.

"Sementara kami sudah melakukan verifikasi dan sertifikasi CHSE. Yang ingin kami sampaikan, klaster ini muncul bukan dari kami di industri. Tapi mungkin dari perkantoran, dan rumah tangga," jelasnya.

Ia berharap pemerintah lebih menekankan peran Satgas Covid-19. Deddy mengeluhkan selama 10 bulan bertahan di tengah pandemi para pengusaha hotel sudah mengeluarkan banyak biaya operasional.

"Oleh karena itu saya meminta pemerintah janganlah kami dikambinghitamkan. Sertifikasi CHSE sudah kami lakukan, bulan lima sampai sekarang reservasi hotel belum nampak," ucap Deddy.

Relaksasi

Dari keluhan tersebut, Deddy berharap Pemda DIY kembali memberikan relaksasi terhadap pengusaha hotel supaya mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. "Karena kondisi industri pariwisata khususnya hotel di DIY saat ini ada yang masih kuat, setengah kuat, hampir pingsan, pingsan, hingga

mati," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini baru 189 hotel dan restoran yang tergabung di PHRI kembali beroperasi. Namun yang bertahan rata-rata hotel bintang 4 sampai 5. Sementara capaian reservasi kamar terkini, Deddy menjelaskan, baru mencapai 30 persen. "Tapi arahan PHRI pusat kami tetap melakukan proses. Tapi dengan memohon pemerintah agar memberikan relaksasi," ungkapnya.

Evaluasi

Di waktu yang bersamaan, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie, menyatakan hal tak jauh berbeda dengan PHRI DIY. Hanya saja, Bobby lebih berharap agar Pemda DIY melakukan monitoring dan evaluasi yang benar-benar nyata terkait pelaksanaan PSTKM.

"Karena kalau tidak ada monitoring dan evaluasi yang nyata, esensi PSTKM tidak ada. Grafik Covid-19 akan tetap naik, ekonomi akan semakin sulit, dan dua-duanya tidak dapat," sambung Bobby.

Sebagai strategi untuk bertahan di tengah pandemi, GIPI DIY selalu rutin melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali terkait pangsa pasar yang bisa dibidik oleh para pengusaha bidang industri pariwisata.

Namun demikian, hal itu tidak dapat diharapkan dalam waktu yang panjang, ka-

rena dirinya meyakini selama pandemi Covid-19 masih ada, kebijakan yang mendarak seperti saat ini akan terus ada. "Nah, relaksasi ini menjadi hal yang diupayakan bersama. Teman-teman industri sendiri butuh supporting aktif," pungkasnya.

Disparta DIY telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada lima Kepala Disparta yang masuk di wilayah DIY serta para pelaku industri pariwisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis).

SE tersebut bernomor 188/00139 tentang pengetatan secara terbatas di sektor pariwisata yang ada di DIY sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1/INSTR/2021 tentang kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM).

Dalam instruksinya, Kepala Disparta DIY, Singgih Raharjo menjelaskan, terdapat 10 poin yang wajib diketahui baik oleh wisatawan maupun pengelola tempat pariwisata.

Untukantisipasi munculnya kerumunan di kawasan Malioboro, secara teknis Singgih menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Yogyakarta. "Malioboro ini kan sebetulnya jalan, ya. Saya yakin Pemkot Yogyakarta punya strategi khusus," imbuhnya. Begitu juga dengan empat kabupaten lainnya. (ard/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005